BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Ditinjau Dari Prinsip Kemanfaatan Hukum, diartikan sebagai kebahagiaan. Yang mana baik dan buruknya suatu hukum tergantung apakah hukum tersebut memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang berkonsep omnibus law. Konsep Omnibuslaw biasa disebut dengan Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma Undang-Undang dalam satu peraturan. Perubahan masalah jangka waktu PKWT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat yang mengatur lebih lama jangka waktu berakhirnya PKWT tersebut apabila ditinjau dari prinsip kemanfaatan hukum yaitu tidak mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum dalam pengaturannya karena memihak para pemberi kerja ketimbang para pekerja.

2. Pengaturan untuk hukum dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*) yang mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum akan menciptakan tertib hukum dimasyarakat, Tertib hukum ada karena rasa percaya masyarakat

terhadap hukum yang berlaku. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Hukum Dimasa Akan Datang (*Ius Constituendum*) Yang Mencerminkan Prinsip Kemanfaatan Hukum yaitu Undang-Undang yang dalam pembentukannya wajib meliputi tahapan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan wajib memiliki konsiderans. Konsiderans terbagi 3 (tiga) yaitu, Landasan Filosofis, Landasan yuridis dan Landasan sosiologis. Ketiga landasan tersebut berlaku dalam pembentukan Undang-Undang yang efektif, agar tercerminnya tujuan hukum yang adil, memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum

B. Saran

1. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dibuat oleh para pihak dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan hukum, agar para pihak yang terikat dalam hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu tidak merasa dirugikan dengan tidak memihak kepada para pihak tertentu. Hal ini agar terwujudnya tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Pengaturan Hukum untuk dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*) harus mengutamakan kepentingan semua pihak, dan mengutamakan

perlindungan dan kemajuan hak asasi semua pihak baik hak para pekerja maupun hak para pemberi kerja. Serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dengan menciptakan tertib hukum dimasyarakat, Tertib hukum ada karena rasa percaya masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Hukum Dimasa Akan Datang untuk kemajuan hukum khususnya hukum ketenagakerjaan dalam jangka panjang.